

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

#### **4.1. Isu Strategis dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011**

##### **4.1.1. Isu Strategis**

Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2009 dan tahun 2010, juga melihat fakta permasalahan dan tantangan pada tahun 2011, maka ditetapkan isu strategis :

1. Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
3. Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Iklim Usaha dan Jaminan Investasi;
5. Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
6. Kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan;
7. Peningkatan Kualitas pelayanan publik dan Keterbukaan Informasi;
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana;
9. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
10. Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkelanjutan;
11. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan.;
12. Apresiasi dan Pengembangan Budaya Daerah serta menggali Potensi Wisata.

Penjelasan dari isu strategis adalah sebagai berikut:

##### **1. Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

Pembangunan pendidikan di Jawa Barat dilakukan dengan 3 (tiga) Pilar Pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan

aksesibilitas, aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas meliputi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar.

Dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strateginya adalah melalui pengembangan dan pengelolaan Sekolah Bertaraf International (SBI) serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru .

Pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, yang menjadi fokusnya adalah pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standardisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan

Permasalahan dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Jawa Barat adalah :

- Minat dan motivasi belajar penduduk 15 th keatas masih rendah
- Angka *drop out* SD, SMP, dan SMA cukup tinggi
- Belum meratanya infrastruktur olahraga masyarakat di wilayah

Fenomena belum menurunnya prestasi Jawa Barat dalam prestasi olahraga nasional menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah perlu diperhatikan. selain itu fenomena kesenjangan antara pendidikan dengan dunia kerja masih cukup besar menjadi tantangan yang perlu dijawab dalam pembangunan pendidikan ke depan.

Tantangan pembangunan pendidikan untuk Tahun 2011 nanti diperkirakan dari semakin banyaknya masyarakat yang miskin, kondisi ruang kelas belajar yang rusak akibat bencana alam atau usia bangunan

serta persaingan dengan hadirnya penyelenggara pendidikan dari luar negeri,

Pada masa mendatang terdapat pula tantangan aktual yang dihadapi, yaitu:

- Masuknya pengelola pendidikan global
- Angka kemiskinan dan pengangguran tinggi
- Kompetisi prestasi olahraga yang tinggi

Sedangkan ancaman yang akan ditemui dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat adalah :

- Sarana sekolah rusak berat
- Tenaga pendidik terbatas
- sarana olahraga yang kurang dan rusak

Selain tantangan dan ancaman tersebut, terdapat pula peluang-peluang yang akan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, yaitu :

- Kebijakan Pemerintah yang mendukung dengan anggaran pendidikan sebesar 20 persen
- Dukungan dunia usaha positif salah satunya dengan program *corporate social responsibility* (CSR)

## **2. Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Berbagai kasus penyakit di Jawa Barat, masih menjadi permasalahan, disebabkan oleh kondisi alam yang mendukung terhadap munculnya penyakit, perilaku masyarakat yang belum menunjukkan kesadaran dalam berperilaku hidup sehat dan bersih. Penyakit TB paru, penyakit ISPA, HIV / AIDS , demam berdarah dan gizi buruk serta penyakit kaki gajah. Penyebaran penyakit HIV-AIDS baik melalui aktivitas sex dan jarum suntik merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan di semua tingkat pemerintahan.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan di puskesmas, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanannya perlu ditingkatkan, demikian pula adanya peningkatan jumlah puskesmas PONEB. Selain itu masalah penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata di setiap daerah menyebabkan terlambatnya penanganan kesehatan di perdesaan.

Masih terdapat permasalahan - permasalahan dalam pembangunan kesehatan di Jawa Barat diantaranya adalah masih tingginya sebaran penyakit menular di beberapa daerah, angka kesakitan degeneratif yang masih tinggi, gangguan kejiwaan meningkat, sarana prasarana dan tenaga pelayan kesehatan yang belum memadai, tingginya penyalahgunaan NAPZA.

Sedangkan fenomena yang terjadi dalam pembangunan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah :

- Sebaran penyakit berkorelasi dengan kualitas lingkungan
- Menjamurnya praktik pengobatan alternatif
- Penanganan kesehatan bersifat parsial, pembagian peran antara pemerintah dan swasta belum terstruktur.

Adapun tantangan aktual kedepan yang dihadapi adalah :

- Pelayanan kesehatan global yang sudah masuk ke Jawa Barat
- Membangun pelayanan kesehatan berkualitas bersama swasta
- Mewujudkan masyarakat yang mandiri kesehatan

Ancaman yang dihadapi di masa mendatang diperkirakan adalah adanya perubahan iklim (*climate change*) sehingga terjadi pemanasan global yang menimbulkan berbagai penyakit, terjadinya mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga mutasi penyakit sangat mudah dan kerusakan lingkungan akibat perilaku masyarakat. Membuat lingkungan menjadi tidak sehat.

Namun demikian ada peluang untuk memajukan pembangunan kesehatan, yaitu:

- Kemajuan iptek dalam kesehatan
- Memiliki Perguruan Tinggi yang dapat mencetak Sumber Daya Manusia kesehatan yang berkualitas
- Komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

### **3. Ketahanan Pangan Masyarakat**

Jumlah penduduk Jawa Barat yang besar merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan. Sehingga tingkat permintaan pangan juga naik dan diperlukannya ketersediaan pangan yang besar dan harus terus ditingkatkan. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas.

Permasalahan yang muncul dalam pembangunan ketahanan pangan masyarakat adalah :

- Belum meningkatnya ketersediaan input produksi pertanian dan kondisi infrastruktur jalan
- Belum meningkatnya produksi dan stok bahan pangan pokok
- Belum terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat;
- Belum terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok

Adapun fenomena yang terjadi dalam rangka pembangunan ketahanan pangan adalah masih tingginya kekurangan pangan diperdesaan pada musim paceklik, terjadinya fluktuasi harga pangan, rendahnya produksi padi, daging sapi, jagung kedele, dan gula dan impor bahan pangan yang masih tinggi.

Sedangkan tantangan kedepannya adalah diperkirakan asumsi konsumsi pangan masyarakat meningkat dan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk serta produktivitas lahan yang terus menurun

#### **4. Iklim Usaha dan Jaminan Investasi**

Pembangunan daerah sangat didukung oleh tingkat investasi dari para pelaku ekonomi. Iklim yang kondusif dalam berusaha harus tetap diupayakan sehingga pelaku ekonomi baik lokal maupun asing dapat menanamkan modalnya di daerah.

Daya saing daerah menjadi faktor utama dalam meningkatkan iklim usaha yang kondusif. Salah satu faktor dari komponen daya saing adalah mengenai aturan yang seringkali tidak mendukung kepada iklim usah dan jaminan investasi di daerah.

Permasalahan yang akan menjadi hambatan dalam iklim usaha di Jawa Barat antara lain :

- Tidak meratanya akses pasar dan dukungan infrastruktur di semua wilayah
- Masih terdapatnya ekonomi biaya tinggi
- Kendala regulasi
- Maraknya gangguan demonstrasi

Adanya fenomena yang juga akan memberi nilai positif ataupun negatif terhadap pembangunan iklim berusaha , antara lain adanya jaminan keamanan investasi dan perpindahan investasi ke luar Jawa Barat

Yang menjadi tantangan aktual pada tahun 2011 antara lain keberadaan pelabuhan laut dan udara yang belum memadai, menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyediaan pelayanan perizinan terpadu/satu pintu dan insentif fiskal bagi pengusaha.

Hal lain yaitu ancaman yang akan muncul yang perlu diwaspadai antara lain munculnya negara kompetitor di kawasan Asia Tenggara ( antara lain Vietnam dan Kamboja), masih terdapat kebijakan pemerintah daerah yang kurang mendukung dunia usaha ( misalnya adanya retribusi daerah yang tidak perlu), Infrastruktur yang kurang handal di kluster industri tertentu , mengakibatkan banjir dan kemacetan lalu lintas.

Adapun peluang-peluangnya dalam berusaha antara lain :

masih tingginya minat investasi di Jawa Barat, aksesibilitas infrastruktur, akses dan peluang pasar, ketersediaan sumberdaya yang kompetitif, adanya dukungan kelembagaan riset dan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

#### **5. Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha kerakyatan yang potensial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat., selain itu jumlah UMKM yang cukup besar di Jawa Barat dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang saat ini masih cukup besar tingkat pengangguran di Jawa Barat.

Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yaitu :

- Rendahnya pemanfaatan peluang usaha oleh pelaku ekonomi
- Rendahnya efektifitas dan nilai tambah usaha
- Rendahnya akses berinvestasi, pelayanan perijinan, regulasi dan jaminan investasi

Fenomena-fenomena yang muncul yang dapat berakibat buruk terhadap perekonomian masyarakat adalah: penyediaan lapangan kerja yang terbatas, masih tingginya pengangguran dan daya beli yang peningkatannya rendah.

Tantangan aktual yang harus dijawab dalam pengembangan UMKM berupa masih terbatasnya pembiayaan dan kemampuan berwirausaha pelaku KUMKM dan masuknya produsen dari luar negeri.

Sedangkan ancaman dalam pada tahun depan dengan diberlakukannya ACFTA diperkirakan sebagai berikut :

- Pemutusan hubungan kerja kepada pegawai
- Harga produk impor berdaya saing tinggi

Peluang yang diharapkan akan memberikan dukungan positif terhadap perkembangan UMKM diperkirakan makin terbukanya pasar ekspor dan dukungan pemerintah pusat mendorong pengembangan KUMKM.

## **6. Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan**

Kemiskinan di Jawa Barat pada tahun 2009 masih sebesar 4,98 juta jiwa. Dampak dari kemiskinan tersebut adalah ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, tidak mampu untuk berobat, daya beli yang rendah.

Permasalahan yang ada dalam upaya penanganan orang miskin dan pengangguran di Jawa Barat meliputi lemahnya daya beli masyarakat di perdesaan, masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dan fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat dengan adanya kemiskinan dan pengangguran antara lain pemutusan hubungan kerja yang masih terjadi karena kondisi perekonomian saat ini, maraknya *trafficking*, anak jalanan dan gelandangan

Tantangan aktual dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran yaitu angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan lapangan kerja yg tersedia, tidak memadainya kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.

Sedangkan ancaman yang dihadapi untuk penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan antara lain :

- Pemberlakuan ACFTA

- Perubahan Iklim (*Climate change*) yang akan berpengaruh kepada masyarakat yang bekerja dibidang pertanian
- Pekerja migran dengan tingkat ketrampilan yang lebih baik dari penduduk Jawa Barat
- Tingginya drop out sekolah

Peluang yang diharapkan dapat menjadi pemicu dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah adanya program penanggulangan kemiskinan yang selalu digulirkan baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta bantuan lembaga donor, bantuan lembaga swasta dan dunia usaha

## **7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi**

Pelayanan publik dan keterbukaan informasi sudah merupakan isu yang berkembang di masyarakat sehingga menjadikan tujuan prioritas utama terpenuhinya kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan, dengan tetap mengedepankan kaidah atau aturan yang berlaku.

Permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain :

- Jumlah dan kualitas Pegawai Negeri Sipil belum sesuai kebutuhan
- Belum terbentuknya kelembagaan yang ramping struktur, kaya fungsi
- Layanan informasi kepada masyarakat yang belum maksimal
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan.
- Tertib administrasi dan pengelolaan aset.
- Kurang sinerginya perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Fenomena yang terjadi dalam pelayanan publik adalah :

- Motivasi kerja yang tumbuh dengan diberlakukannya Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP)
- Penurunan KKN dalam proyek dengan pengadaan oleh LPSE dan ULP
- Penyederhanaan perijinan melalui BPPT
- Keterbatasan dan ketergantungan pada APBD

Untuk mencapai pelayanan publik yang diharapkan maka terdapat tantangan aktual, yaitu diperlukannya aparat birokrasi yang bersih dan produktif.

Adapun ancaman yang muncul terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah politisasi birokrasi yang akan menghambat dan merusak kinerja birokrasi.

Peluang - peluang yang ada yang menjadi jalan untuk menuju kebaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

- Dukungan luar negeri untuk menciptakan *good governance*
- *Supporting* kebijakan dan dana APBN
- Pembiayaan swasta dan swadaya masyarakat
- Dukungan masyarakat untuk menciptakan *clean government*

## **8. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana**

Bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, pencemaran dan kerusakan lingkungan, merupakan kejadian yang rutin terjadi di Jawa Barat. Demikian pula bencana alam gempa bumi, letusan gunung api, dan angin ribut yang dapat terjadi secara insidental.

Permasalahan yang menyebabkan bencana bencana tersebut terjadi serta pasca kejadian bencana adalah :

- Kurangnya koordinasi penanganan bencana
- Pembangunan hanya berorientasi ekonomi
- Lambatnya penanganan bencana

Fenomena yang mengikuti dengan kejadian bencana adalah :

- Tingginya intensitas bencana
- Perubahan iklim (climate change) dengan adanya pemanasan global
- Pembalakan liar yang sulit diawasi
- Alih fungsi lahan yang tidak terkendali
- Lemahnya penegakan hukum

Tantangan aktual yang mesti dilakukan untuk pengendalian bencana adalah dengan mendorong masyarakat ke arah perilaku yang ramah lingkungan.

Sedangkan ancaman yang diperkirakan akan muncul adalah :

- *Climate Change*
- Penggundulan hutan yang tidak terkendali

Peluang yang ada yang harus tetap ditumbuhkan didalam kehidupan bermasyarakat adalah masih tumbuhnya kesadaran hidup serasi dengan alam di masyarakat.

## **9. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah**

Kebutuhan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pembangunan wilayah sebagai pengarah pembentukan struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

Rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah baik dari segi ketersediaan dan kualitas masih merupakan persoalan besar di Jawa Barat yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah.

Permasalahan yang masih ada dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, antara lain belum tuntasnya pembebasan lahan dan konstruksi, tingkat kerusakan infrastruktur yang tinggi dan kurangnya koordinasi lintas sektor/wilayah serta sumber daya manusia dan pendanaan yang belum sesuai dengan kebutuhan.

Fenomena yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur wilayah adalah :

- Rendahnya tingkat pelayanan terutama di kota-kota besar dan desa-desa
- Kerusakan infrastruktur lebih cepat daripada umur rencana
- Pendanaan sebagian besar masih dari APBN dan APBD

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi dan dapat diantisipasi adalah sebagai berikut : penuntasan pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan pencarian sumber-sumber pendanaan dari sektor swasta.

Selain itu terdapat pula ancaman yang harus diwaspadai, dan diantisipasi yaitu tingginya tingkat kebencanaan di Jawa Barat, ketidakpastian pendanaan secara *multi years*, terbukanya peluang sumber pendanaan baru untuk pengembangan infrastruktur wilayah dan kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

#### **10. Pemenuhan Kebutuhan Energi Berkelanjutan**

Kebutuhan energi meningkat seiring pertumbuhan penduduk, namun tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaannya yang pada akhirnya dihadapkan pada masalah kerentanan energi yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energi.

Permasalahan yang masih terjadi dalam kebutuhan energi adalah terbatasnya cadangan sumber energi tidak terbarukan. Fenomena yang muncul yaitu adanya penggunaan energi yang tidak efisien sedangkan tantangan aktual yang diperlukan jalan keluarnya yaitu melalui pemanfaatan energi alternatif.

Ancaman dengan penggunaan energi yang terus menerus tanpa pengendalian dan pengembangan energi alternatif adalah :

- Pemanfaatan energi semakin meningkat
- Ketergantungan terhadap energi fuel (konvensional)  
Selain ancaman, masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu:
- Tingginya potensi sumber energi alternatif terbarukan
- Penganekaragaman penggunaan berbagai jenis energi

## **11. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan.**

Dalam upaya menumbuhkan kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan filosofinya adalah masyarakat desa menjadi subyek pembangunan dan bukan menjadi obyek pembangunan itu sendiri.

Permasalahan yang masih terjadi dalam pembangunan desa adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pelayanan kesehatan masyarakat desa, adanya keterbatasan aparatur desa, fasilitas sosial dan fasilitas umum masih sangat terbatas.

Adapun fenomena yang terjadi dalam pembangunan masyarakat perdesaan, yaitu bantuan pembangunan desa, pengangkatan sekretaris desa, kesenjangan kota-desa yang semakin melebar.

Tantangan yang dihadapi dalam desa membangun adalah bagaimana mewujudkan desa dimana perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif yang melibatkan masyarakat sehingga akan menumbuhkembangkan desa, dan masyarakat desa bukan hanya sebagai objek saja tapi sekaligus menjadi subjek dalam pembangunan.

Ancaman yang akan dihadapi dalam desa membangun yaitu semakin merebaknya budaya konsumtif di masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya perkotaan.

Peluang untuk meningkatkan desa membangun menuju kemandirian desa yaitu dengan membangun pasar pertanian, masih terdapatnya

lahan subur dan luas dan masih dipertahankan nilai – nilai gotong royong di masyarakat perdesaan

## **12. Apresiasi dan Pengembangan Budaya Daerah serta Menggali Potensi Wisata**

Arus informasi dari berbagai mancanegara yang sangat deras memasuki negara Indonesia terutama ke Jawa Barat sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kehidupan budaya lokal. Kondisi tersebut akan melunturkan nilai, sikap, dan mental yang sangat erat dengan budaya daerah, sehingga jati diri masyarakat yang berbudaya daerah secara cepat akan hilang. Dengan pengetahuan teknologi yang semakin canggih, sulit untuk menahan masuknya budaya asing ke suatu negara. Upaya yang perlu dilakukan adalah melalui pelestarian dan pengembangan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, sejarah, kepurbakalaan termasuk memelihara bahasa, aksara dan sastra daerah dan melestarikan seni serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya daerah secara global.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Jawa Barat adalah :

- Rendahnya ketahanan budaya masyarakat
- Belum banyaknya pengakuan HAKI budaya Jabar
- Performa dan manajemen kepariwisataan yang belum baik

Fenomena yang terjadi dalam pengembangan kepariwisataan di Jawa Barat yaitu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya di masyarakat serta waktu dan distribusi kunjungan wisata.

Globalisasi informasi, kemajuan informasi teknologi dan image dan penurunan jumlah wisatawan merupakan tantangan kedepan dalam rangka pengembangan budaya daerah dan menggali potensi lokal.

Ancaman yang akan menghambat kepada pengembangan budaya daerah dan kepariwisataan adalah sebagai berikut : berkembangnya budaya materialisme, meluasnya globalisasi budaya, maraknya pengakuan karya cipta seni budaya oleh negara lain dan pengelolaan pariwisata oleh negara asing.

Adapun peluang yang menjadi harapan kedepan dalam pengembangan budaya daerah dan mengali potensi lokal adalah :

- Pemanfaatan media komunikasi dalam pelestarian budaya
- Kekayaan dan keragaman budaya Jabar
- Pasar wisatawan dalam dan luar negeri

#### 4.1.2. Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011

Dirumuskan dua belas Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun 2011 untuk merespon isu- isu strategis dan sasaran pembangunan daerah.

*Pertama* : Arah Kebijakan pembangunan bidang **Pendidikan** adalah pada : (1) mengupayakan bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (2) peningkatan kapasitas daya tampung; (3) peningkatan kualitas penyelenggaraan sekolah luar biasa; (4) peningkatan kesiapan penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional; dan (5) mendorong kemajuan pendidikan tinggi.

*Kedua* : Arah Kebijakan pembangunan pembangunan bidang **Kesehatan**, adalah pada (1) pengurangan disparitas layanan kesehatan dan keluarga berencana; (2) Penanganan kesehatan melalui peran multi sektor; (3) Meningkatkan sumberdaya dan mutu layanan kesehatan.

*Ketiga* : Kebijakan pembangunan berkaitan dengan isu strategis **Ketahanan Pangan** diarahkan pada : (1) menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas; (2) pemenuhan distribusi pangan masyarakat ; (3) optimalisasi potensi agribisnis lokal.

*Keempat:* Kebijakan pembangunan dalam rangka **penanganan Iklim Usaha dan Investasi** diarahkan pada (1) Penciptaan iklim investasi yang kondusif, jaminan keamanan dan kepastian hukum; (2) penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; (3) mendorong kerjasama dan membuka peluang investasi bagi pihak swasta.

*Kelima:* Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)** diarahkan pada (1) Peningkatan kelembagaan dan dukungan modal usaha bagi KUMKM; (2) peningkatan kualitas pelaku usaha dan produk UMKM; (3) Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja di sektor UMKM.

*Keenam:* Arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan** diarahkan pada : (1) menumbuhkembangkan budaya masyarakat bekerja; (2) penciptaan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik di perkotaan maupun di perdesaan; (3) melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap derajat kemiskinan.

*Ketujuh:* Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Peningkatan Kualitas Layanan Publik** diarahkan pada (1) menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel; (2) menyiapkan SDM yang memiliki daya saing dan kemampuan berkomunikasi; (3) mengimplementasikan *paperless office*, layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sebagai bagian dari program *Jabar Cyber Province*.

*Kedelapan:* Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana** diarahkan pada : (1) merehabilitasi lahan kritis secara massal; (2) mewujudkan tata ruang untuk pembangunan berkelanjutan sebagai realisasi *Jabar Green Province*; (3) meningkatkan kualitas mitigasi bencana dan penanggulangan korban bencana secara akurat; (4) meningkatkan pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu regional.

*Kesembilan:* Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah** diarahkan pada : (1) membangun infrastruktur jalan untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan baru; (2) membangun infrastruktur sumber daya air dan pengembangan jaringan irigasi; (3) membangun infrastruktur energi dan ketenagalistrikan; (4) membangun prasarana dasar permukiman hunian vertikal khususnya di perkotaan.

*Kesepuluh:* Arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Pemenuhan Kebutuhan Energi yang Berkelanjutan**, diarahkan pada : (1) pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan; (2) memanfaatkan kondisi alam setempat untuk sumber energi.

*Kesebelas:* Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan** diarahkan pada : (1) meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk beraktifitas di perdesaan; (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sejak tahapan perencanaan; (3) menumbuhkembangkan aktivitas perekonomian di perdesaan melalui optimalisasi peran BUMDES.

*Keduabelas:* Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan **Budaya Daerah dan Potensi Wisata**, diarahkan pada: (1) pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan; (2) menggali potensi-potensi wisata baru di luar wisata alam.

#### **4.2. Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011**

Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 pada pembangunan bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di berbagai bidang dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pembangunan bidang ekonomi harus dilaksanakan secara sinergi dengan bidang-bidang yang lain untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka penciptaan peningkatan

kesejahteraan rakyat, dalam RPJM 2010-2014 kondisi utama yang harus diciptakan adalah (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh; serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

### **4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

#### **4.3.1. Tema Pembangunan**

Berdasarkan kondisi dan fenomena yang terjadi di Jawa Barat serta isu strategis, maka ditetapkan tema pembangunan Tahun 2011, yaitu :

**Memantapkan sinergi pembangunan yang bermutu dan akuntabel  
Bersama pemerintah pusat, kabupaten/kota dan mitra  
Menuju masyarakat jawa barat  
Yang mandiri, dinamis dan sejahtera**

Adapun guna mendukung pencapaian tema pembangunan di atas di arahkan pada program prioritas dan kegiatan tematik berbasis *Common Goals* dan Kewilayahan.

#### **4.3.2. Common Goals**

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun prioritas pembangunan daerah dengan menggunakan instrumen *common goals* dan *non common goals*.

Pencapaian *Common Goals* membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan, dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Ciri utama dari sinergitas tersebut sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen kebersamaan lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

2. Perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama seluruh OPD yang terlibat berdasarkan prinsip *SMART PLANNING* dan bersifat akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
3. Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan prinsip *SHEWHART CYCLE (Plan, Do, Check, Action)*.
4. Pelibatan secara aktif lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat serta segenap pelaku pembangunan lain termasuk masyarakat sebagai mitra strategis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Dalam rangka pencapaian pembangunan dilakukan melalui strategi *Common Goals* dan *non-Common Goals*. Program/kegiatan yang disinergiskan melalui *Common Goals* merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Jawa Barat 2008-2013, yang diwujudkan melalui sinergitas dengan pembagian peran OPD dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: OPD utama, OPD mitra utama dan OPD pendukung (kelompok OPD pendukung umum serta kelompok OPD penjaminan mutu dan akuntabilitas); serta dengan memberikan keberpihakan anggaran pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat.

*Common Goals* merupakan rencana kerja prioritas pembangunan yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) *Common Goals* sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Difokuskan pada meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan guna pencapaian AMH dan RLS melalui pelayanan pendidikan non formal dan formal dasar dan menengah diikuti dengan pendidikan luar biasa dan kemampuan baca tulis serta pengembangan pendidikan bertaraf internasional.

Sasaran:

- a. Jabar bebas biaya sekolah pendidikan dasar 9 tahun dan perintisan Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan menengah 12 tahun;

- b. Penyelenggaraan pendidikan nonformal paket a,b dan c plus kewirausahaan;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional;
- d. Penyelenggaraan pendidikan dasar luar biasa;
- e. Pengembangan infrastruktur olahraga dan pemuda;
- f. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi.

## **2. Peningkatan Kualitas Kesehatan**

Difokuskan pada pelayanan kesehatan dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sasaran:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD;
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesertaan dalam program KB;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD;
- e. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- f. Menuju *Universal coverage* JPKM;
- g. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD;
- h. Meningkatkan Citra Kawasan Jatinangor sebagai Etalase Kawasan Pendidikan Jawa Barat.

## **3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat**

Difokuskan pada pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,

penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui prinsip masyarakat bekerja.

Sasaran:

- a. Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
- b. Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi;
- c. Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat;
- d. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing serta;
- e. Terkendalinya tata niaga hulu-hilir dan perlindungan konsumen, dalam menghadapi persaingan global;
- f. Tumbuhnya Industri Kreatif dan wirausahawan muda.

#### **4. Kemandirian Pangan**

Difokuskan pada ketersediaan dan kecukupan aneka bahan pangan berbasis potensi lokal, yang berkualitas dan berkesinambungan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya ketersediaan dan kesinambungan input produksi bahan pangan;
- b. Terkendalinya stock pangan dan keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi;
- c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat;
- d. Meningkatnya dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan.

## 5. Peningkatan Kinerja Aparatur

Difokuskan pada meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintahan daerah yang didukung oleh kualitas dan pengelolaan data dan informasi yang akurat dan handal dalam kerangka satu data untuk pembangunan Jawa Barat.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan *Good Governance*;
- b. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan;
- d. Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan;
- e. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas dalam pembangunan.

## 6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Difokuskan pada pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi serta permukiman

Sasaran :

- a. Meningkatnya Efektivitas Pergerakan Orang, Barang dan Jasa di Pusat Kegiatan Ekonomi;
- b. Tersedianya Infrastruktur Strategis Pendukung Pengembangan Wilayah dan Kegiatan Ekonomi;
- c. Meningkatnya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan;
- d. Tersedianya Infrastruktur Sumber daya Air dan irigasi sebagai Penyedia Air baku serta Pengendali Banjir dan Kekeringan.

## **7. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku**

Difokuskan pada pengembangan energi alternatif dan listrik perdesaan, serta infrastruktur penyedia air baku

Sasaran:

- a. Tersedianya energi untuk mendukung pembangunan Jawa Barat;
- b. Pemenuhan kecukupan air baku untuk mendukung pembangunan Jawa Barat.

## **8. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup**

Difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana, percepatan penanganan korban manusia, penanggulangan akibat bencana serta pelestarian dan perluasan kawasan lindung

Sasaran:

- a. Meningkatkan efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana;
- b. Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung dan pengendalian luasan lahan kritis;
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan udara dan air.

## **9. Pembangunan Perdesaan**

Difokuskan pada Meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, kapasitas fiskal, infrastruktur dasar dan perekonomian perdesaan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
- b. Meningkatnya peran aparat desa dalam pembangunan

## 10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

Difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal serta destinasi wisata untuk kemajuan pembangunan Jawa Barat.

Sasaran:

- a. Terselenggaranya eksplorasi, penerapan, dan pengembangan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal dalam proses pembangunan Jawa Barat;
- b. Karya serta kreativitas seni dan budaya local;
- c. Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah dalam rangka peningkatan kegiatan kepariwisataan di Jawa Barat.

Dari 10 (sepuluh) *Common Goals* dengan fokus dan sasaran, maka ditetapkan 40 (empat puluh) **kegiatan tematik** yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan dalam setiap bidang pembangunan. Adapun yang menjadi kriteria belanja pembangunan berbasis tematik adalah :

1. Kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Jawa Barat secara bermakna dalam merespon isu dan problematik pembangunan di Jawa Barat;
2. Menyelesaikan secara bertahap dan terukur atas permasalahan kronis (menahun) pada setiap common goals;
3. Sebagai kegiatan monumental dalam RPJM Daerah tahun 2008 – 2013;
4. Dikerjakan lintas OPD/Biro atau bersama instansi di luar Pemprov secara komprehensif dan koordinasi.

Rincian kegiatan tematik tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- *Common Goals 1*, terdiri dari 6 (enam) kegiatan tematik :

Kegiatan Tematik 1 : Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota

- Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal plus Kewirausahaan dengan sasaran 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat
- Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Bertaraf Internasional
- Kegiatan Tematik 4 : Pendidikan berkeadilan
- Kegiatan Tematik 5 : Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- Kegiatan Tematik 6 : Pembinaan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi

- *Common Goals 2* , terdiri dari 6 ( enam) kegiatan tematik

- Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan
- Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Program Keluarga Berencana
- Kegiatan Tematik 3 : Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/GEMAMAPAN)
- Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC dan Flu Burung
- Kegiatan Tematik 5 : Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- Kegiatan Tematik 6 : Pengembangan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat

*Common Goals 3*, terdiri dari 5 (lima) kegiatan tematik, yaitu :

- Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Budaya Masyarakat Bekerja dan Perluasan Lapangan Kerja serta Kesempatan Berusaha UMKM
- Kegiatan Tematik 2 : Sukses Jawa Barat Sebagai Daerah Tujuan Investasi.

- Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan Skema Pembiayaan alternatif
- Kegiatan Tematik 4 : Pengembangan Agribisnis, *Forest* Bisnis, *Marine* Bisnis, Agroindustri dan Industri Manufaktur
- Kegiatan Tematik 5 : Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda Kreatif

*Common Goals 4*, terdiri dari 4 (empat) kegiatan tematik :

- Kegiatan Tematik 1 : Sukses Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional Tahun 2013
- Kegiatan Tematik 2 : Sukses 13 JutaTon GKG dan Swasembada Protein Hewani Tahun 2013
- Kegiatan Tematik 3 : Jawa Barat Bebas Rawan Pangan
- Kegiatan Tematik 4 : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur (Jalan, Jembatan & Irigasi) di dan ke Sentra Produksi Pangan

*Common Goals 5*, terdiri dari 5 (lima) kegiatan tematik :

- Kegiatan Tematik 1 : Profesionalisme Aparatur untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel
- Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar *Cyber Province*
- Kegiatan Tematik 3 : Penataan sistem hukum di daerah dan penegakan hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan
- Kegiatan Tematik 4 : Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah dan Wilayah Perbatasan
- Kegiatan Tematik 5 : Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan

*Common Goals 6* terdiri dari 4 (empat) kegiatan tematik :

- Kegiatan Tematik 1 : Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya
- Kegiatan Tematik 2 : Penyediaan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur – Sukabumi – Bogor, Jakarta Cirebon, Bandung Tasikmalaya serta Jabar Selatan
- Kegiatan Tematik 3 : Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kota/Kab serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru
- Kegiatan Tematik 4 : Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat

*Common Goals 7*, terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik, yaitu :

- Kegiatan Tematik 1 : Jabar Mandiri Energi Perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik
- Kegiatan Tematik 2 : Pemenuhan Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat.

*Common Goals 8*, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik :

- Kegiatan Tematik 1 : Penanganan Banjir lintas wilayah di Cekupan Bandung, Pantura dan Bodebek
- Kegiatan Tematik 2 : Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS priotas (Cimanuk, Citarum, Ciliwung) dan Kawasan Pesisir serta Pulau Kecil melalui Jabar *Green Province*
- Kegiatan Tematik 3 : Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional

*Common Goals 9*, terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik :

- Kegiatan Tematik 1 : Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri
- Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah desa

*Common Goals 10*, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik :

- Kegiatan Tematik 1 : Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat
- Kegiatan Tematik 2 : Sukses Gelar karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat
- Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan *heritage* serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa Bali

#### **4.3.3. Non Common Goals**

*Non-Common Goals (Differential Goals)* merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan.

#### **4.3.4. Kewilayahan**

Berdasarkan kewilayahan pembangunan daerah diarahkan pada 4 (empat) Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat, yaitu:

1. WKPP I mencakup: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok, dengan program unggulan sebagai berikut: a) Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi

- potong dan domba di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi; b) Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur; c) Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKN Prov) Palabuanratu yang diupayakan menjadi PKN pada tahun 2011; d) Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional; e) Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas.
2. WKPP II mencakup: Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, dengan program unggulan sebagai berikut: a) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi; b) Pengembangan kawasan industri manufaktur; c) Pengembangan industri perberasan; d) Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta hutan mangrove; e) Pengembangan wisata sejarah dan kepurbakalaan.
  3. WKPP III, meliputi: Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan dengan program unggulan sebagai berikut: a) Pengembangan agribisnis mangga; b) Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; c) Pengembangan destinasi wisata berupa wisata budaya, eko wisata, wisata ziarah (pilgrimage) serta Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai dan Taman Raya Kuningan; d) Pengembangan perikanan budidaya air payau serta hutan mangrove; e) Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan.
  4. WKPP IV, meliputi: Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat dengan program unggulan sebagai berikut: a) Pusat pengembangan pendidikan dan riset; b) Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar di Kab. Ciamis, Tasikmalaya dan Kota

Banjar serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Sumedang dan Garut, domba Garut di Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak di Kabupaten Garut; c) Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat dan Kota Cimahi; d) Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya; e) Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran.

#### **4.4. Prioritas Program Pembangunan Daerah**

##### **1. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

- a. Bidang Pendidikan, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran :
    - a) Meningkatnya angka partisipasi program Paket C
    - b) Meningkatnya angka partisipasi program Paket B
    - c) Meningkatnya angka partisipasi program Paket A
  - 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
    - b) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
    - c) Meningkatnya pelayanan pendidikan di daerah terpencil;
    - d) Terselenggaranya SD dan SMP bertaraf internasional;
    - e) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP;
  - 3) Program Pendidikan Menengah dan Tinggi, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK;
    - b) Tersedianya aneka beasiswa untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
    - c) Terselenggaranya SMA dan SMK bertaraf internasional;

- d) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SMA dan SMK;
  - e) Meningkatnya Relevansi dan Daya Saing Lulusan Siswa SMK;
  - f) Meningkatnya fasilitasi penyediaan sumber dan media belajar SMA/SMK;
  - g) Tercapainya rasio SMK : SMA, 60 : 40
  - h) Meningkatnya Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
- 4) Program Pendidikan Luar Biasa, dengan sasaran :
- a) Meningkatnya jumlah Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK);
  - b) Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan PK dan PLK;
  - c) Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK.
- 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya jumlah anggaran insentif guru;
  - b) Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1;
  - c) Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi.
- b. Bidang Ketenagakerjaan, melalui program sebagai berikut:
- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan sasaran:
- a) Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan kewirausahaan;
  - b) Terselenggaranya standarisasi dan sertifikasi;
  - c) Terselenggaranya pembinaan lembaga latihan swasta dan lembaga latihan pemerintah.

## **2. Peningkatan Kualitas Kesehatan**

- a. Bidang Kesehatan, melalui program sebagai berikut:
- 1) Program Upaya Kesehatan, dengan sasaran:

- a) Meningkatnya komitmen dan kemampuan Kabupaten/Kota untuk mencapai Desa Siaga dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - b) Meningkatnya jumlah Keluarga Sadar Gizi/status gizi masyarakat;
  - c) Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi;
  - d) Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu;
  - e) Meningkatnya penggunaan obat – obat yang rasional dan pemakaian obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di setiap jenjang;
  - f) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra;
  - g) Tertanggulangnya masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana dan antisipasi *global warming*;
  - h) Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur.
- 2) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran ;
- a) Meningkatnya Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi *Center Of Excellent/Rujukan Spesifik* berbasis Masalah Kesehatan Jawa Barat (stroke, penyakit jantung, gerontology, dll.) yang mempunyai kualitas tingkat Nasional/Dunia;
  - b) Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (Laboratorium Diagnostik Kesehatan) regional Jawa Barat (HIV, Flu Burung, dll.);
  - c) Tersedianya Anggaran/pembiayaan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna

- dan berdaya guna dan diutamakan untuk Upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (Preventif dan Promotif);
- d) Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Provinsi;
  - e) Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan Provinsi, SPM bidang kesehatan Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan;
  - f) Terwujudnya sistem informasi dan *Surveillance* Epidemiologi Kesehatan yang *evidence base*, akurat diseluruh Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Barat dan *on line* dengan Nasional;
  - g) Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS, pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal;
  - h) Pelayanan kesehatan di setiap Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya memenuhi standar mutu;
  - i) Terwujudnya Akuntabilitas dan pencapaian Kinerja program pembangunan kesehatan yang baik.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran:
- a) Peningkatan Kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
  - b) Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
  - c) Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan.

### 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat

- a. Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.
  - 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian;
    - b) Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
    - c) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
    - d) Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (GEMAR), serta pengembangan perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA);
    - e) Meningkatnya pendapatan petani petambak melalui revitalisasi perikanan pantura dan pemanfaatan sumber daya alam perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA);
    - f) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen.
  - 3) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
    - b) Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran;
    - c) Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
    - d) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
    - e) Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;

- f) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, dengan sasaran terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan.
  - 2) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
    - a) Mendorong penumbuhan wirausaha, dan wirausaha yang berdaya saing serta penyerapan tenaga kerja;
    - b) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi;
    - c) Meningkatnya kemitraan usaha bagi pelaku usaha dalam mendorong produktivitas usaha;
    - d) Optimalnya promosi usaha bagi UMKM dalam mendukung hasil usaha.
  - 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM dengan jaminan kolateral berkerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro dan CSR;
    - b) Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi KUMKM;
    - c) Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM serta pendukung pendampingan tempat usaha.

- d. Bidang Perdagangan, melalui program sebagai berikut :
  - 1) Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran:
    - a) Optimalnya distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis;
    - b) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri;
    - c) Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan;
    - d) Meningkatnya pengembangan dan perlindungan pasar tradisional (GEMPITA).
- e. Bidang Industri, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM;
    - b) Meningkatnya kemitraan antar industri;
    - c) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah;
    - d) Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah;
    - e) Meningkatnya industri kreatif.
  - 2) Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya sinergitas pengembangan industri;
    - b) Meningkatnya penguasaan teknologi industri.
- b. Bidang Penanaman Modal, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Peningkatan Iklim Investasi, dengan sasaran:
    - a) Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah;
    - b) Terfasilitasinya jaminan keamanan dan kepastian hukum;
    - c) Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat;
    - d) Terfasilitasinya pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;

- 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan sasaran:
  - a) Terbentuknya forum interaksi investor mitra Jawa Barat (*West Java Partner*);
  - b) Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Jawa Barat;
  - c) Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal;
  - d) Meningkatnya kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta;
  - e) Terasilitasinya perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus;
- c. Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran:
    - a) Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik;
    - b) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan jalan kesentra pertanian di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan.
  - 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar dan struktur yang direncanakan.
  - 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal.

- 4) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui fasilitasi pembangunan daerah irigasi Leuwi Goong di Kabupaten Garut serta daerah irigasi strategis lainnya;
- 5) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi fungsi sungai, waduk, situ, embung dan sumber air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri melalui fasilitasi percepatan pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Waduk Sukahurip di Kabupaten Ciamis, Waduk Cikembang di Kabupaten Ciamis, Waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang, Waduk Cipanas di Kabupaten Sumedang serta pembangunan waduk-waduk strategis lainnya;
- 6) Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dengan sasaran tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir, kekeringan serta pengamanan pantai;

#### **4. Kemandirian Pangan**

- a. Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian;
    - b) Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
    - c) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
    - d) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian;

- e) Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian;
  - f) Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan;
  - g) Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (Gemar) dan pengembangan perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA);
  - h) Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
  - i) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen;
  - j) Optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- 2) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat;
  - b) Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis;
  - c) Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air serta terkendalinya konversi lahan pertanian.
- 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, dengan sasaran terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan.
- 4) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - b) Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - c) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - d) Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - e) Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

- b. Bidang Ketahanan Pangan, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya ketersediaan pangan pokok, beras, jagung, kedelai, daging, susu, telur dan ikan;
    - b) Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat bidang pangan di pedesaan;
    - c) Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan;
    - d) Tertatanya distribusi dan perdagangan pangan;
    - e) Meningkatnya keanekaragaman konsumsi, dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga;
    - f) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian keamanan pangan.
- c. Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan;
  - 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar dan struktur yang direncanakan.
  - 3) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri.

- 4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal.

## 5. Peningkatan Kinerja Aparatur

- a. Bidang Perencanaan Pembangunan, melalui sebagai berikut :
  - 1) Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
    - b) Tersedianya dokumen perencanaan makro dan sektoral yang pro publik.
- b. Bidang Komunikasi dan Informatika, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik menuju *cyber province*,
    - b) Meningkatnya sosialisasi dan peran media massa dalam penyebaran informasi secara objektif dan bertanggung jawab;
    - c) Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat;
    - d) Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan; dan
    - e) Memberikan inspirasi perlunya pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan dan penuh kekinian berdasarkan fenomena hambatan pembangunan daerah.
- c. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah, dengan sasaran:
    - a) Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- b) Terlaksananya peningkatan kesejahteraan aparatur untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - c) Terselenggaranya penataan daerah otonom dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembangunan Jawa Barat;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya kinerja aparatur;
  - b) Meningkatnya disiplin aparatur.
- 3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum, dan HAM, dengan sasaran:
- a) Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
  - b) Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal;
- 4) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan sasaran meningkatnya penataan dan pendayagunaan asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten dan Kota, revitalisasi dan reorientasi BUMD serta terlaksananya persiapan pemanfaatan obligasi daerah.

## **6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah**

- a. Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran:
    - a) Terlaksananya pembangunan jalan tol, jalan lingkar, dan *fly over* pada ruas-ruas strategis di Jawa Barat;
    - b) Terciptanya jaringan jalan yang dapat menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik;
    - c) Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan.

- 2) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri.
  - 3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan.
  - 4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal.
  - 5) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan sasaran tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai.
- b. Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut :
- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan di Jawa Barat;
    - b) Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
    - c) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- c. Bidang Perhubungan, melalui program sebagai berikut :
- 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan sasaran:
    - a) Terlaksananya pengembangan angkutan massal;
    - b) Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara di Jawa Barat;

- c) Terlaksananya pengembangan dan pembangunan pelabuhan laut di Jawa Barat.
- d. Bidang Penataan Ruang, melalui Program Penataan Ruang, dengan sasaran terwujudnya RTRW Provinsi Jawa Barat sebagai acuan penataan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

## **7. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku**

- a. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya penggunaan energi alternatif;
    - b) Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan.
  - 2) Program Pengembangan Sumberdaya Mineral dan Panas Bumi, dengan sasaran meningkatnya pendayagunaan panas bumi sebagai sumber energi listrik di Jawa Barat, melalui pengembangan sumber energi panas bumi, Kabupaten Sumedang (Tampomas), Kabupaten Bandung (Cibuni, Patuha, Wayang Windu, dan Kamojang), Kabupaten Bandung Barat (Tangkubanparahu), serta Kabupaten Garut (Kawah Darajat), Kabupaten Bogor – Cianjur (Gede Pangrango).
  - 3) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber air lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi fungsi sungai, waduk, situ, embung dan sumber air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, domestik dan industri, melalui fasilitasi percepatan pembangunan waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Waduk Sukahurip, Waduk Cikembang dan Waduk Leuwi Keris di Kabupaten Ciamis, Waduk Citepus di Kabupaten Sukabumi, Waduk Santosa di Kabupaten Bandung, Waduk Cibatarua di Kabupaten Garut, Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang, Waduk

Cipanas di Kabupaten Sumedang serta pembangunan waduk-waduk strategis lainnya.

## **8. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup**

- a. Bidang Sosial, melalui program sebagai berikut :
  - 1) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
    - a) Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
    - b) Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana;
    - c) Meningkatkan kemampuan dan jumlah sumber daya penanggulangan bencana.
- b. Bidang Lingkungan Hidup, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan sasaran:
    - a) Mengurangi beban pencemaran badan air oleh industri dan domestik;
    - b) Mengurangi beban emisi dari kendaraan bermotor dan industri;
    - c) Mengawasi pemanfaatan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan pembuangan limbah B3;
    - d) Mengembangkan produksi yang lebih bersih (*Cleaner Production*) dan EPCM (*Environmental Pollution Control Manager*).
  - 2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
    - a) Mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
    - b) Rehabilitasi dan konservasi keanekaragaman hayati.
  - 3) Program Pengelolaan Kawasan Lindung, dengan sasaran:
    - a) Melakukan penataan dan perbaikan fungsi kawasan lindung;
    - b) Meningkatkan pengamanan dan perlindungan kawasan;
    - c) Mengembangkan kawasan lindung baru;

- d) Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan lindung.

## **9. Pembangunan Perdesaan**

- a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat , dengan sasaran:
    - a) Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan;
    - b) Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan.
  - 2) Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan sasaran:
    - a) Meningkatnya kinerja pemerintahan desa;
    - b) Meningkatnya kualitas sarana prasarana desa;
    - c) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa;
    - d) Meningkatnya infrastruktur perdesaan;
    - e) Meningkatnya perekonomian di perdesaan;
    - f) Meningkatnya Meningkatnya kualitas lingkungan dan sosial di perdesaan.
- b. Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui program antara lain :
  - 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
    - a) Mendorong penumbuhan wirausaha, dan wirausaha yang berdaya saing serta penyerapan tenaga kerja;
    - b) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
- c. Bidang Ketenagakerjaan, melalui Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan sasaran penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.
- d. Bidang Pertanian, melalui program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran:
  - a) Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian;
  - b) Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan;
  - c) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan dan peternakan;
  - d) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian;
  - e) Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian;
  - f) Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan;
  - g) Meningkatnya multi aktivitas agribisnis (GEMAR) dan pengembangan perikanan di Pantai Utara dan Selatan (GAPURA);
  - h) Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
  - i) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen.
- 2) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran:
  - a) Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - b) Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran;
  - c) Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - d) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - e) Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
  - f) Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

- e. Bidang Pekerjaan Umum, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan provinsi dan non status di Jawa Barat untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemetaan pembangunan.
  - 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam batas repetisi beban standar maupun struktur yang direncanakan.
  - 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan sasaran tersedianya Jaringan Irigasi yang handal.
  
- f. Bidang Perumahan, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pengembangan Permukiman, dengan sasaran meningkatnya Infrastruktur Dasar Perdesaan.
  - 2) Program Lingkungan Permukiman Sehat dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.
  - 3) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman, dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam pengelolaan lingkungan permukiman.

## **10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata**

- a. Bidang Kebudayaan, melalui program sebagai berikut:
  - 1) Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan sasaran:
    - a) Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah;
    - b) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah.

- 2) Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Jawa Barat;
  - b) Meningkatnya pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang seni dan budaya;
  - c) Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta;
  - d) Meningkatnya sarana dan prasarana gelar karya dan kreatifitas seni budaya daerah yang representatif.